

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian yang berjudul Rekomendasi Pencapaian Target Kinerja Sistem Pengumpulan Sampah Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo sudah dilakukan pembahasan kinerja pengumpulan sampah meliputi tingkat pelayanan pengumpulan, kesesuaian antara kondisi eksisting dengan standar dan referensi, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengumpulan, dan rekomendasi peningkatan kinerja pengumpulan sampah. Jadi hasil dari analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Tingkat Pelayanan Pengumpulan Sampah

TPS Ungup-ungup melayani 19 RW yang melingkup tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kanigaran, Kelurahan Tisnonegaran dan Kelurahan Kebonsari kulon. Jumlah KK yang terlayani sebanyak 2273 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 9092 jiwa. Berdasarkan hasil perhitungan bahwa tingkat pelayanan pada daerah pelayanan berbeda-beda tergantung dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Pada RW 1 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 57,72%, RW 4 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 28,44%, RW 5 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 46,38%, RW 6 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 64,40%, RW 7 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 82,02%, RW 8 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 33,88%, RW 10 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 28,65%, RW 11 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 60,88%, RW 12 Kelurahan Kanigaran tingkat pelayanan mencapai 58,44%, RW 1 Kelurahan Tisnonegaran tingkat pelayanan mencapai 34,63%, RW 2 Kelurahan Tisnonegaran tingkat pelayanan mencapai 43,29%, RW 3 Kelurahan Tisnonegaran tingkat pelayanan mencapai 50,44%, RW 6 Kelurahan Tisnonegaran tingkat pelayanan mencapai 26,78%, RW 7 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 51,95%, RW 8 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 54,68%, RW 9 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 35,42%, RW 10 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 66,60%, RW 11 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 42,58% dan RW 14 Kelurahan Kebonsari kulon tingkat pelayanan mencapai 69,26%. Sehingga dapat diketahui tingkat pelayanan tertinggi yaitu pada RW 7 Kelurahan Kanigaran sebesar

82,02% dan daerah yang memiliki tingkat pelayanan terkecil yaitu RW 6 Kelurahan Tisnonegaran hanya sebesar 26,78%. Jadi tingkat pelayanan pada daerah layanan hanya mencapai 49 % artinya volume sampah yang tidak terangkut lebih banyak daripada sampah yang terangkut ke TPS.

Namun berdasarkan target tingkat pelayanan Masterplan Persampahan Kota Probolinggo tahun 2011-2030 harus mencapai 80% dan mengacu pada Kepmen PU dan Perumahan tahun 2015-2019 mencapai 100%. Jadi dari perhitungan tingkat pelayanan sebesar 49% untuk kondisi eksisting dikatakan kurang baik karena berada dibawah target pelayanan sampah yang ditetapkan

5.1.2 Kinerja Operasional Pengumpulan Sampah

Kesesuaian kinerja operasional antara hasil kondisi eksisting dengan standar dan literature terkait kinerja pengumpulan sampah. Adapun variabel kinerja pengumpulan sampah yang digunakan yaitu jenis alat pengumpul, jumlah petugas pengumpulan, ritasi pengumpulan, periode pengumpul, jadwal pengumpulan, alat pelindung diri dan radius pelayanan pengumpulan. Hasil kesimpulan pada 7 variabel tersebut yaitu:

1. Variabel alat pengumpul sebesar 95% karena dari 19 RW terdapat 18 RW alat pengumpul yang sudah memenuhi standar
2. Variabel petugas pengumpul sebesar 42% karena dari 19 RW terdapat 8 RW jumlah petugas sampah yang sudah memenuhi standar
3. Variabel ritasi pengumpul sebesar 100% karena ritasi pengumpulan pada 19 RW sudah memenuhi standar
4. Variabel periode pengumpulan sebesar 100% karena periode pengumpulan pada 19 RW sudah memenuhi standar
5. Variabel Jadwal pengumpulan sebesar 47% karena dari 19 RW terdapat 9 RW jadwal pengumpulan yang sudah memenuhi standar
6. Variabel alat pelindung diri sebesar 0% karena kelengkapan APD yang digunakan petugas pada 19 RW belum sesuai dengan referensi
7. Variabel jarak TPS ke permukiman sebesar 100% karena jarak TPS pada 19 RW sudah memenuhi standar

Kemudian untuk hasil kesesuai kinerja operasional pengumpulan sampah masing-masing RW sebagai berikut:

1. Kesesuaian sebesar 86% pada RW 10 Kelurahan Kanigaran, RW 1 dan RW 6 Kelurahan Tisnonegaran artinya dari tujuh variabel terdapat enam variabel yang

sesuai standar dan satu variabel yang tidak sesuai dengan standar yaitu alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas

2. Kesesuaian sebesar 71% pada RW 1, RW 8 Kelurahan Kanigaran, RW 2, RW 3 Kelurahan Tisnonegaran, RW 9, RW 11 Kelurahan Kebonsari Kulon artinya dari tujuh variabel terdapat lima variabel yang sesuai standar dan dua variabel yang tidak sesuai dengan standar yaitu jumlah petugas pengumpul dan alat pelindung diri yang digunakan petugas.
3. Kesesuaian sebesar 71% pada RW 5, RW 7, RW 12 Kelurahan Kanigaran, RW 14 Kelurahan Kebonsari kulon artinya dari tujuh variabel terdapat lima variabel yang sesuai standar dan dua variabel yang tidak sesuai dengan standar yaitu alat pelindung diri yang digunakan petugas dan jadwal pengumpulan sampah
4. Kesesuaian sebesar 57% pada RW 4, RW 11 Kelurahan Kanigaran, RW 7, RW 8, RW 10 Kelurahan Kebonsari kulon artinya dari tujuh variabel terdapat empat variabel yang sesuai standar dan tiga variabel yang tidak sesuai dengan standar yaitu jumlah petugas pengumpul, alat pelindung diri petugas dan jadwal pengumpulan sampah
5. Kesesuaian sebesar 57% pada RW 6 Kelurahan Kanigaran artinya dari tujuh variabel terdapat empat variabel yang sesuai standar dan tiga variabel yang tidak sesuai dengan standar yaitu alat pengumpul, jumlah petugas pengumpul dan alat pelindung diri yang digunakan petugas.

Jadi dapat disimpulkan untuk variabel yang belum memenuhi standar dapat dilakukan perbaikan guna meningkatkan kinerja pelayanan pengumpulan sampah di daerah layanan yaitu alat pengumpul sampah berupa becak, jumlah petugas sampah untuk gerobak dorong, kelengkapan alat pelindung diri dan jadwal pengumpulan sampah waktu sore hari.

5.1.3 Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengumpulan Sampah

Penilaian tingkat kepuasan terhadap 10 atribut terkait dengan kinerja pengumpulan sampah antara lain petugas berpengalaman dalam bekerja, metode pengumpulan yang digunakan petugas, kelengkapan alat pelindung diri petugas pengumpul sampah, kondisi alat pengumpul sampah yang digunakan, jarak TPS ke permukiman, ketepatan waktu petugas dalam pengambilan sampah, jumlah periode pengumpulan sampah, keteraturan periode pengambilan sampah, besaran retribusi yang ditetapkan dan sistem pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil analisis IPA yang berada pada kuadran IV (Prioritas Utama) yaitu atribut dianggap penting tapi kinerjanya masih belum baik dan memuaskan sehingga

perlu perbaikan yaitu pada atribut ketepatan waktu petugas dalam pengambilan sampah (17 RW), jumlah periode pengumpulan sampah (18 RW), keteraturan periode pengambilan sampah (17 RW), kondisi alat pengumpul (1 RW), sistem pembayaran retribusi (3 RW) dan metode pengumpulan yang digunakan petugas (8 RW)

5.1.4 Rekomendasi Pencapaian Target Kinerja Pengumpulan Sampah

Hasil dari analisis kinerja operasional pengumpulan sampah dan analisis IPA akan diperbaiki kemudian disusun rekomendasi guna mencapai target kinerja pelayanan pengumpulan sampah. Target capaian kinerja pengumpulan sampah dilihat dari 2 kondisi yaitu target dari Masterplan Persampahan Kota Probolinggo tahun 2011-2030 sebesar 80% dan target pelayanan pengelolaan sampah dari Kepmen PU dan Perumahan tahun 2015-2019 sebesar 100%. Berikut merupakan variabel yang perlu diperbaiki:

1. Ritasi pengumpulan dan periode pengumpulan
Perlu ada penambahan jumlah periode pengumpulan yaitu agar sampah yang dihasilkan dari daerah pelayanan dapat terangkut semua ke TPS Ungup-ungup dan tidak ada sisa sampah dan dapat mengurangi pembuangan secara liar
2. Petugas pengumpul
Penambahan petugas sampah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan petugas sampah agar kerja petugas lebih efektif.
3. Jadwal pengumpulan
Perlu dilakukan sosialisasi ke petugas sampah yaitu dengan cara memberikan pengarahan dan masukan ke petugas sampah agar lebih profesional dan disiplin waktu saat bekerja, sehingga lebih tepat waktu dan rutin, memberikan pengarahan juga ketua RT/RW setempat untuk mengawasi kesesuaian waktu kerja petugas, dan bila perlu menjadwalkan ulang kembali waktu-waktu petugas saat pengambilan sampah.
4. Alat pelindung diri
Perlu ada kebijakan dan sosialisasi lebih lanjut terkait dengan alat pelindung diri petugas agar lebih rasa tanggung jawab saat bekerja serta terhindar dari kecelakaan kerja dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja petugas. Selain itu, petugas lebih disarankan harus menggunakan sarung tangan karena dapat memudahkan petugas memindahkan sampah dari bak sampah ke gerobak sampah, sehingga sampah tidak berceceran, dan kondisi bak sampah terlihat bersih
5. Alat pengumpul sampah

Perlu dilakukan perawatan berkala pada gerobak sampah, dan pada daerah pelayanan RW 6 Kelurahan Kanigaran yang semula menggunakan becak perlu mengganti ke gerobak sampah

6. Retribusi sampah

Pada daerah RW 6 Kelurahan Kanigaran, RW 9 dan RW 10 Kelurahan Kebonsari Kulon perlu perbaikan pada sistem pembayaran retribusi

Kebijakan yang mendukung dengan rekomendasi kinerja pengumpulan sampah yaitu RTRW Kota Probolinggo tahun 2009-2028, Masterplan Persampahan Kota Probolinggo tahun 2011-2030, dan DLH Kota Probolinggo tahun 2017. Jadi untuk pencapaian target 80% (berdasarkan Masterplan Persampahan Kota Probolinggo) dan target 100% (berdasarkan Kepmen PU dan Perumahan) dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan proses pewadahan agar sampah tidak terlalu lama ditempat
2. Diupayakan inisiatif dari masyarakat untuk melakukan reduksi dari sumbernya
3. Perlu adanya pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah
4. Semua perwakilan dari KK didaerah pelayanan perlu hadir dalam sosialisasi dan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah
5. DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Probolinggo melakukan sosialisasi kepada petugas sampah terkait pentingnya alat pelindung diri (APD)
6. Meningkatkan sosialisasi kepada petugas terkait alat pelindung diri (APD) yaitu seragam, sepatu booth, helm pengaman/topi, sarung tangan dan penutup hidung
7. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya agar masyarakat tidak membuang sampah secara liar
8. Optimalisasi kinerja pengumpulan sampah dengan penyesuaian retribusi
9. Pembayaran retribusi sampah dikoordinir dengan ketua RT/RW setempat
10. Penambahan biaya operasional persampahan dari pemerintah
11. Perbaikan sistem teknis operasional pengumpulan sampah yang terdiri dari
 - Penambahan ritasi pengumpulan sampah sebanyak 1-3 kali perhari
 - Penambahan periode pengumpulan samph sebanyak 1-2 hari sekali dan sebaiknya dilakukan setiap hari
 - Pengaturan ulang jadwal pengumpulan dengan menyesuaikan jam kerja petugas yaitu terhitung sehari 8 jam dari pukul 07.00-15.00 dan pengumpulan sampah di TPS tidak boleh dilakukan pada sore hari

- Memberikan pengarahan juga ketua RT/RW setempat untuk mengawasi petugas sampah terkait dengan kesesuaian jam kerja di lapangan dengan jadwal yang sudah ditetapkan
- Perlu dilakukan penambahan petugas sampah dan disesuaikan dengan jumlah gerobak sampah yang beroperasi
- Memberikan pengarahan dan masukan ke petugas sampah agar lebih disiplin saat bekerja
- Melakukan perawatan pada gerobak sampah dan mengganti gerobak sampah yang rusak

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang diberikan antara lain:

A. Akademisi

1. Metode pengambilan data berupa timbulan sampah pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih detail pada masing-masing sumber sampah dan jenisnya, sehingga jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPS dapat lebih akurat
2. Perlu dilakukan perhitungan potensi reduksi sampah pada sampah domestik yang memiliki nilai ekonomi misalnya pada sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah kaca, dan sampah logam.

B. Masyarakat

1. Tidak melakukan pembuangan sampah secara liar yaitu pembakaran sampah, pembuangan sampah di sungai serta membuang sampah langsung ke TPS yang nantinya dapat mengakibatkan dampak pencemaran lingkungan dan kondisi TPS yang terlihat penuh penumpukan sampah dan bau.
2. Masyarakat dihimbau untuk melakukan mereduksi sampah (konsep 3R) pada sumbernya sehingga nantinya dapat membatasi jumlah sampah yang masuk ke TPS

C. Pemerintah

Pemerintah disarankan untuk melakukan peningkatan pada kinerja operasional pengumpulan dari sumber sampah hingga ke TPS dengan meningkatkan fasilitasnya dan penerapan sistem pemilahan sampah pada TPS.